

L

LAPORAN

K

KINERJA

I

INSTANSI

P

PEMERINTAH

Tahun 2023

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Sulawesi Selatan guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin.

Makassar, Januari 2024

Kepala Pelaksana,

AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19701113 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
1.5. Gambaran Umum Organisasi BPBD.....	4
1.6. Issu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Perjanjian Kinerja.....	17
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.....	18
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.....	19
3.2. Capaian Kinerja Sasaran.....	19
3.3. Realisasi Anggaran	22
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
BAB IV PENUTUP.....	26
4.1. Capaian Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	26
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	27

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan	9
Tabel 1.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.3.	Jumlah Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan	11
Tabel 1.4.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.5.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	18
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	18
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	19
Tabel 3.2.	Tabel Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	20
Tabel 3.3.	Pencapaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	20
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	21
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	21
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, Jangka Menengah dan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	21
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Jangka Menengah dan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi	

Selatan Tahun 2023	22
Tabel 3.8. Rencana Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	23
Tabel 3.9. Alokasi Anggaran Per Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023	23
Tabel 3.10. Alokasi Anggaran Per Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023	24



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Grafik 1.2.	Jumlah Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	12
Grafik 1.4.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	13
Grafik 3.1.	Jumlah dan Persentase Anggaran terhadap Target Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	24
Grafik 3.2.	Jumlah dan Persentase Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	24



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, serta mengacu kepada visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan BPBD Tahun 2018-2023, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPBD. Laporan Kinerja BPBD Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan BPBD yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPBD Tahun 2023. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BPBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

- (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1.3. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD.

Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional

Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sebagai implementasi amanat UU dan Peraturan terkait lainnya, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009 telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan PERDA nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Selatan yang disusul dengan keluarnya Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Selatan.

1.5. Gambaran Umum Organisasi BPBD

1.5.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Kelembagaan Lain Provinsi Sulawesi Selatan, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon Ib (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon IIIa dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.

Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan su Koordinator Seksi Kesiapsiagaan.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Sub Koordinator Seksi Kedaruratan dan Sub Koordinator Seksi Logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

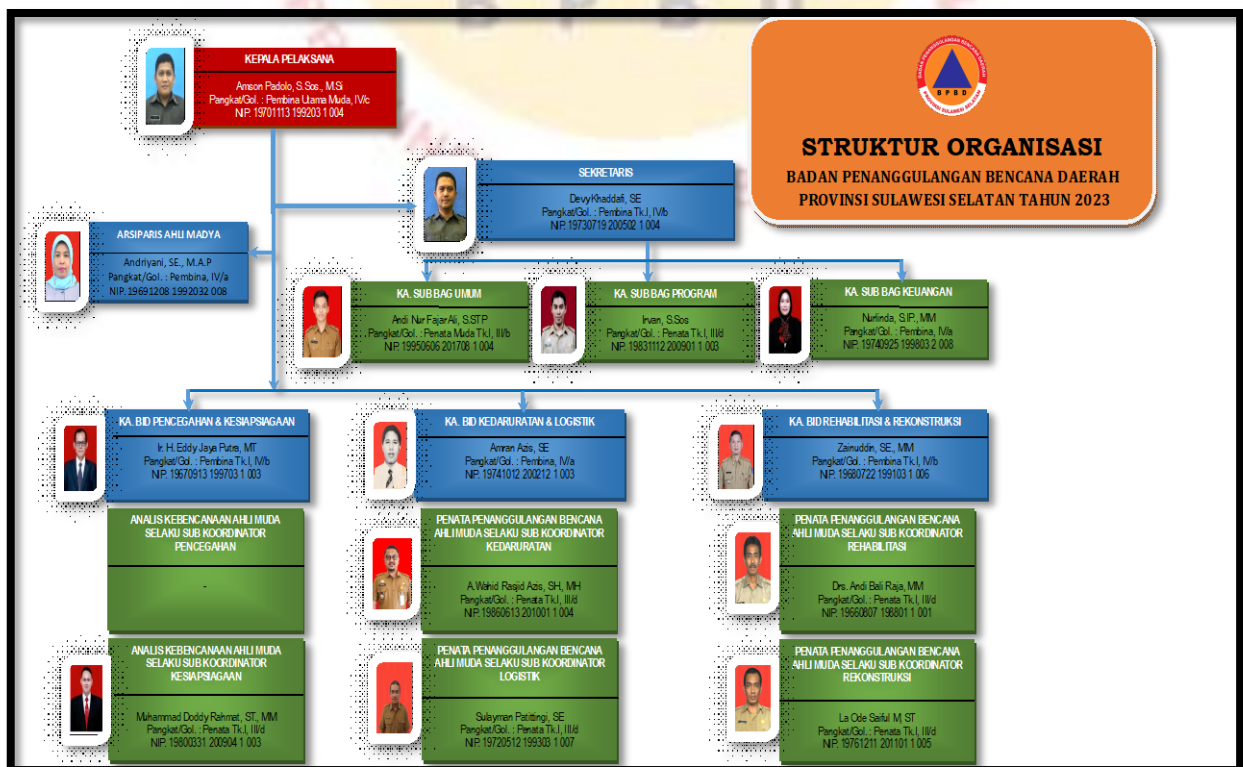
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi dan Sub Koordinator Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari:

1. Kepala Badan (Eselon Ib) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIa) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IIIa) 1 orang
4. Kepala Bidang (Eselon IIIa) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Koordinator (Eselon IVa) 9 orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan



1.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, maka BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam hubungan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana, yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai petunjuk dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan.

Fungsi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Pengarah

Fungsi unsur pengarah adalah:

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Memantau; dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Unsur Pelaksana

Fungsi unsur pelaksana adalah:

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsidan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

- a. Tugas: membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.
- b. Fungsi:
 - Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - Pengelolaan keuangan;
 - Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

- a. Tugas: mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.
- b. Fungsi:
 - Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
 - Pengoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;

- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
 - Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengajaran BPBD;
 - Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.
- 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- a. Tugas: Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana.
- b. Fungsi:
- Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
 - Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
 - Penyiapan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana;
 - Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana;
 - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a. Tugas: mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan, kerugian, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan peralatan dan logistik saat terjadi bencana.
- b. Fungsi:
- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
 - Melaksanakan kegiatan dengan pola penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana;
 - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Tugas: mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa.
- b. Fungsi:
 - Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
 - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.3. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2023, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang dan perempuan sebanyak 10 (Sepuluh) orang.

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S2 sebanyak 11 (Sebelas) orang, S1 sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, kemudian SLTA sebanyak 4 (Empat) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat dalam tabel pada halaman selanjutnya.

TABEL 1.1
DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

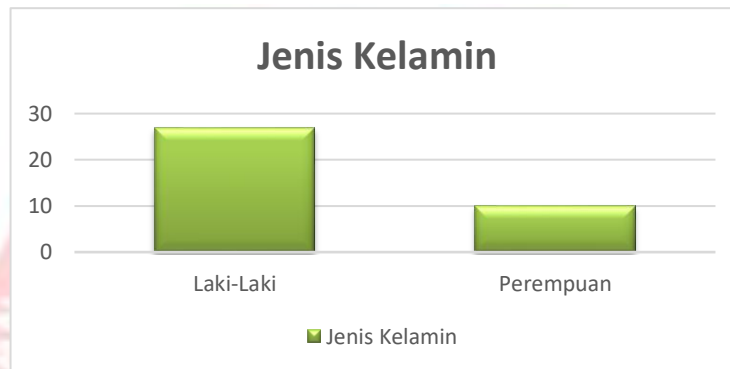
NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si NIP. 19701113 199203 1 004 Pembina Utama Muda, IV/c	KEPALA PELAKSANA BPBD
2.	DEVY KHADDAFI, SE NIP. 19730719 200502 1 004 Pembina Tk.I, IV/b	SEKRETARIS
3.	H. EDDY JAYA PUTRA, ST., MT 19670913 199703 1 003 Pembina Tk.I, IV/b	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
4.	AMRAN AZIS, SE NIP. 19741012 200212 1 003 Pembina, IV/a	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
5.	ZAINUDDIN, SE., MM NIP. 19680722 199103 1 006 Pembina Tk.I, IV/b	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
6.	IRVAN, S.Sos NIP. 19831112 200901 1 003 Penata Tk.I, III/d	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
7.	LA ODE SAIFUL M, S.T. 19761211 201101 1 005 Penata, III/c	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR REKONSTRUKSI
8.	MUHAMMAD DODDY RAHMAT, S.T, MM. 19800331 200904 1 003 Penata Tk.I, III/d	ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR KESIAPSIAGAAN
9.	A. WAHID RASJID AZIS, S.H., M.H. 19860613 201001 1 004 Penata Tk.I, III/d	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR KEDARURATAN
10.	NURLINDA, S.I.P., M.M. 19740925 199803 2 008 Penata Tk.I, III/d	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

11.	Drs. A. BALI RAJA, M.M. 19660807 198801 1 001 Penata Tk.I, III/d	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR REHABILITASI
12.	SULAYMAN PATITTINGI, S.E. 19720512 199303 1 007 Penata Tk.I, III/d	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR LOGISTIK
13.	ANDI NUR FAJAR ALI, S.STP NIP. 19950606 201708 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14.	ANDRIYANI, S.E., M.A.P 19691208 199203 2 008 Penata Tk.I, III/d	AHLI MUDA – ARSIPARIS
15.	SALMAH, S.H. 19670905 200604 2 010 Penata Tk.I, III/d	Pengelola Data
16.	MASRIUDDIN, S.E., M.M. 19750727 200901 1 008 Penata Tk.I, III/d	Penata Keuangan
17.	SITTI BAHARIAWATI, S.E. 19650923 198803 2 015 Penata Tk.I, III/d	Pengelola Program dan Kegiatan
18.	ASMAWATI, S.Sos. 19760109 200701 2 019 Penata Tk.I, III/d	Penyuluh Bencana
19.	KHADIRAH, S.T. 19790425 201101 2 002 Penata, III/c	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
20.	ANDI MIFTAHUDDIN, S.ST. 19901209 201402 1 001 Penata, III/c	Analisis Perencanaan
21.	SUKMAWANTI, S.Psi 19900308 202203 2 005 Penata Muda, III/a	Analisis Bencana
22.	ADHYATMA, S.ST., M.Tr.AP 19880608 201504 1 002 Penata Muda Tk.I, III/c	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
23.	LILISARI RAMADHANI, S.ST. 19890422 201402 2 003 Penata, III/c	Analisis Bencana
24.	MUTAQDIR RASUL, S.ST. 19870708 201402 1 002 Penata, III/c	Analisis Bencana
25.	ANDI INSANUL KAMIL, S.ST. 19890704 201402 1 005 Penata, III/c	Analisis Penanggulangan Krisis
26.	HASRUL AMRAN, S.M. 19850502 201001 1 036 Penata Muda Tk.I, III/b	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana & Prasarana
27.	EMILDA BAHARUDDIN, S.Sos. 19800315 200003 2 001 Penata Muda, III/a	Pengelola Program dan Kegiatan
28.	ABDUL RAHMAN S.ST NIP. 198809112015041001 Penata, III/c	Penata Keuangan
29.	ANDI ARAS HALIM 19830908 200801 1 005 Pengatur Tk.I, II/d	Bendahara
30.	ISAK TORANO 19821226 200801 1 011 Pengatur, II/c	Pengelola Gaji
31.	SYAMSUL BAHRI 19830809 200801 1 003 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
32.	ANDI JUSTAN, A.md 19781231 200801 1 007 Pengatur Tk.I, II/d	Pengadministrasi Umum
33.	WAWAN EKA SETIAWAN 19810322 201001 1 012 Pengatur Muda Tk.I, II/B	Pengadministrasi Umum
34.	YANDI KINANTAKA, S.ST 19921104 201903 1 015 Penata Muda, III/a	Penyuluh Bencana
35.	IBRAHIM NUR ASLAM, ST., M.Si 19751225 200312 1 008 Pembina, IV/a	Pengelola Program dan Kegiatan
36.	ANSHARI SHALEH ISMAIL, S.ST 19891216 201504 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Mitigasi Bencana
37.	SUSANTI HALIM, ST 19850328 201101 2 018 Penata, III/c	Pengelola Program dan Kegiatan

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	27
2.	Perempuan	10
JUMLAH		37

Grafik 1.1.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	8	1	9
JUMLAH		11	3	14

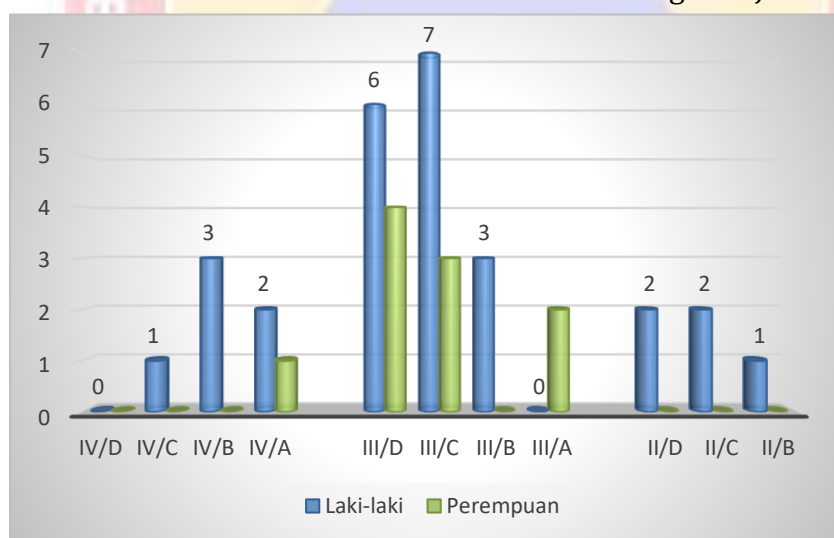
Grafik 1.2.
Jumlah Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin

Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
IV/d	-	-	0
IV/c	1	-	1
IV/b	3	-	3
IV/a	2	1	3
JUMLAH	6	1	7
III/d	6	4	11
III/c	7	3	8
III/b	3	-	3
III/a	0	2	4
JUMLAH	16	9	26
II/d	2	-	2
II/c	2	-	2
II/b	1	-	1
JUMLAH	4	1	5
TOTAL	26	11	37

Grafik 1.3.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin



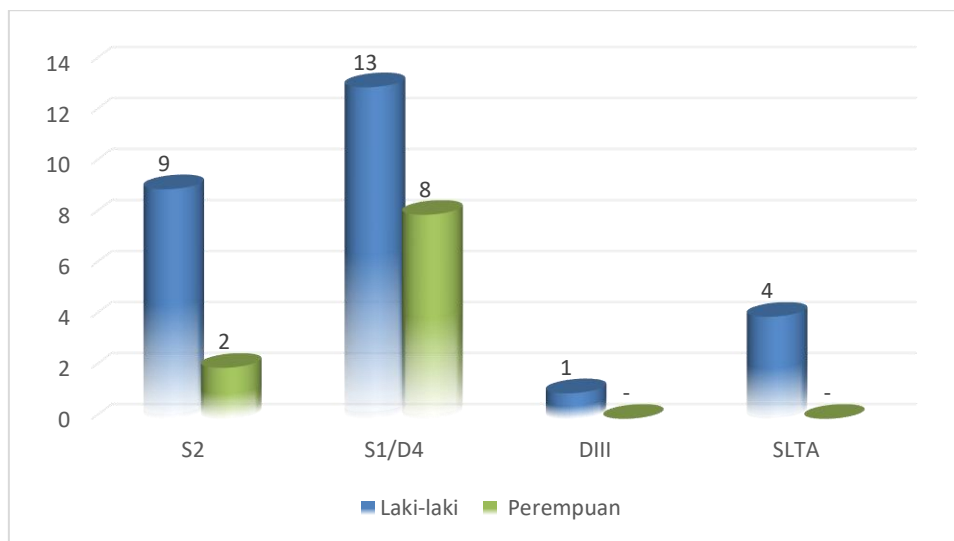
Tabel 1.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S2	9	2	11
S1/DIV	13	8	21
DIII	1	0	1
SMA	4	0	4

TOTAL	27	10	37
-------	----	----	----

Grafik 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin



1.6. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang kemudian disandingkan dengan telaahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Renstra BNPB Tahun 2020-2024, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdapat bebedapa hal yang menjadi isu strategis, antara lain:

1. Tingginya ancaman bencana di Provinsi Sulawesi Selatan

Lokasi Indonesia berada di 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik di bagian utara Pulau Papua dan Halmahera. Zona ini ditandai dengan keberadaan palung yang cukup dalam. Keberadaan Indonesia di zona ini memberi dampak pada ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, Kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir bandang. Di Provinsi Sulawesi Selatan, ancaman bencana yang sering terjadi adalah banjir, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempa bumi.

Isu pemanasan global menjadi salah satu penyebab tingginya ancaman bencana di dunia, termasuk di Sulawesi Selatan. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi akibat dari meningkatnya gas-gas rumah kaca seperti karbon. Meningkatnya kadar gas rumah kaca menyebabkan bumi terkena efek seperti diselimuti kaca, dalam hal ini yang berperan sebagai kaca adalah gas-gas rumah kaca tersebut sehingga mengakibatkan panas

dari matahari yang telah masuk ke bumi lalu dipantulkan oleh permukaan bumi yang tidak bisa menembus “lapisan kaca” tersebut sehingga memantul kembali ke bumi dan lebih menghangatkan suhu bumi lagi.

Kondisi ini menyebabkan hujan menjadi jarang dan bila hujan terjadi akan berlebihan. Suhu rata-rata saat musim panas akan jadi sangat panas karena panas menjadi terperangkap, sementara itu saat musim dingin akan menjadi sangat dingin karena pemanasan tidak bisa menjangkau daerah yang jauh dari matahari. Cuaca menjadi lebih membahayakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya petir, angin puting beliung, angin kencang, banjir, tanah longsor, hujan es, kekeringan, dan bencana lainnya.

2. Tingginya kerentanan Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Ancaman Bencana

Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api (volcanic arc) di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, utara Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Deret gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunungapi sepanjang Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai *Ring of Fire* atau deret sirkum Pasifik. Zona yang berada diantara pertemuan lempeng dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan (*fore arc*) banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sedangkan zona yang berada disisi setelah deret gunung api (*back arc*) cenderung lebih jarang dijumpai patahan aktif dan biasanya banyak dijumpai endapan alluvial dan rawa.

Dampak lain dari aktivitas tektonik adalah terbentuknya patahan atau sesar. Beberapa patahan yang cukup besar antara lain, adalah patahan Semangko di Sumatera, patahan Sorong di Papua dan Maluku, dan patahan Palukoro di Sulawesi. Patahan Palukoro merupakan patahan yang memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bonedengan panjang patahan sekitar 500km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggaral (sebelah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan terhadap guncangan gempa bumi yang umumnya relative dangkal. Keberadaan patahan ini memberi dampak pada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.

Indonesia juga dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu, Berdasarkan hasil analisis sampai dengan Tahun 2013 (RBI Indonesia,

2016), luas daratan Indonesia adalah 190, 31 Juta Ha, sementara luas tutupan hutannya adalah 82, 37 juta Ha atau sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia. Namun tutupan hutan ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh pulau di Indonesia.

3. Rendahnya kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Bencana

Tingginya ancaman dan kerentanan wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap bencana seharusnya dibarengi dengan tingginya pemahaman masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana. Sepanjang 5 tahun terakhir, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, baik melalui APBD Provinsi maupun APBN. Namun, jumlah penduduk yang semakin berkembang setiap tahunnya menjadi pekerjaan rumah bagi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi bencana. Kesadaran masyarakat atas kejadian bencana yang masih rendah serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi 2 hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Provinsi Sulawesi Selatan harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Sulawesi Selatan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan penyusunan RENSTRA BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Bagian ini akan menguraikan Visi Gubernur Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

Visi :

Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Visi tersebut memberi gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud, jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilandasi oleh kebersamaan, kemitraan, keberdayaan dan keterpaduan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwarisi masyarakat Sulawesi Selatan.

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan lainnya serta kondisi kebencanaan 5 (lima) tahun terakhir. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2018-2023 adalah:

1. **Mengoptimalkan Penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**
2. **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun 2018-2023 adalah:

1. **Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah**

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan serta mencapai tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana Sulawesi selatan untuk periode tahun 2018-2023 dan berdasarkan sinkronisasi dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh satu instansi. Perjanjian Kinerja (PK) memuat sasaran, indikator sasaran, target sasaran beserta program dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	1. Indeks Risiko Bencana	150,05
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP OPD	85
		2. Presentase Capaian Kinerja Program	92%
		3. % Temuan Materil	0,05%

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target Tahun 2023	Target Akhir Renstra
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	150,05	150,05

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 memuat kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan turunan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2023. Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Indikator	2023		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	150.05	144,47	103,8%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2023 **menunjukkan capaian 103,8%**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

3.2. Capaian Kinerja Sasaran

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tabel Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*Performance Gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	1. Indeks Risiko Bencana	150,05	144,47	103,8
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP OPD	85	80,60	98,3
		3. Presentase Capaian Kinerja Program	92%	100	108,6 %
		4. Presentase Temuan Materil	0,50%	0%	0%

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk sasaran “**Menurunnya Indeks Risiko Bencana**” dengan 1 indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	100,11%	101,6%	103,8%

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk sasaran “**Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**” dengan 3 indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP OPD	100,11%	98,2%	98,3%
2	Presentase Capaian Kinerja Program	110,87%	109,8%	108,6%
3	Presentase Temuan Materil	1,20%	0%	0%

* berdasar pokok-pokok hasil pemeriksaan (belum LHP)

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional untuk sasaran “**Menurunnya Indeks Risiko Bencana**” dengan 1 indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Jangka Menengah dan Nasional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	144,47	150,05	-

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional untuk sasaran

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan” dengan 3 indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun 2023, Jangka Menengah dan Nasional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP OPD	80,60	85	-
2	Presentase Capaian Kinerja Program	100%	92%	-
3	Presentase Temuan Materil	0%	0,50%	-

* berdasar pokok-pokok hasil pemeriksaan (belum LHP)

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana, yaitu dengan meningkatkan koordinasi pentahelix urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait, baik lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun tingkat Kabupaten/Kota, akademisi, dunia usaha, media serta masyarakat. Sehingga nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan dapat diturunkan dari 150.07 pada tahun 2022 Menjadi 144.47 pada tahun 2023.

Dalam melaksanakan kegiatan, senantiasa dilakukan koordinasi dengan OPD terkait agar perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan adanya temuan, baik materil maupun non materil.

Untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, OPD BPBD Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan pengetahuan SDM terkait peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengikutsertakan SDM dalam kegiatan bimtek maupun pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun di tingkat Pusat.

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 19.140.840.910,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 17.626.986.010,- (92,1%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.513.854.900 (7,9%).

Tabel 3.8.
Rencana Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	17.626.986.010,-	92,1
2.	Belanja Modal	1.513.854.900	7,9
	Jumlah	19.140.840.910,-	100,00

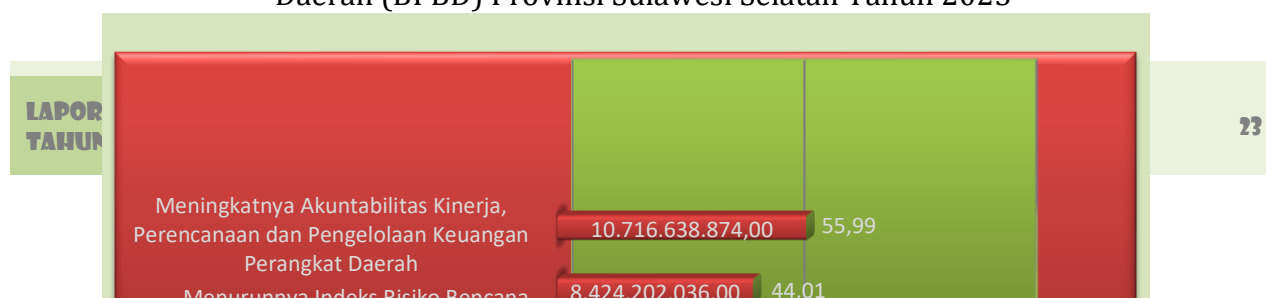
Alokasi Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.9.
Alokasi Anggaran Per Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tahun Anggaran 2023.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	%
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	1. Indeks Risiko Bencana	8.424.202.036	44,01%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP OPD 3. Presentase Capaian Kinerja Program 4. Presentase Temuan Materil	10.716.638.874	55,99%
		Jumlah	19.140.840.910	100,00

Pada tabel tersebut, persentase anggaran terbesar dialokasikan ke sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.424.202.036,- (44,01%), selanjutnya sasaran Menurunnya Indeks Risiko Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.716.638.874,- (55,99%).

Grafik 3.1.
Jumlah dan Persentase Anggaran terhadap target Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

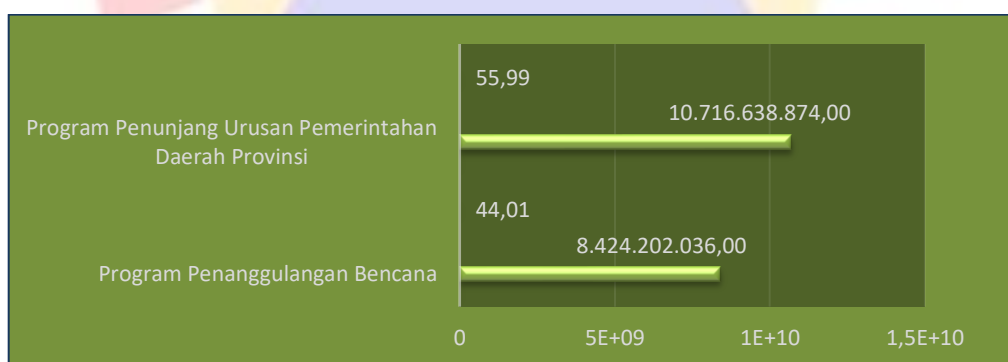


Alokasi anggaran Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 untuk membiayai program dan kegiatan yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.10.
Alokasi Anggaran Per Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2023

No.	Program	Anggaran	%
1.	Penanggulangan Bencana	8.424.202.036	44,01
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.716.638.874	55,99
JUMLAH		15.686.569.195,00	100,00

Grafik 3.2.
Jumlah dan Persentase Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di dukung oleh 37 personil ASN, jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang serta kemampuan tentang kebencanaan yang relatif masih rendah. Melakukan program pendidikan kebencanaan bagi aparatur BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sangat penting di masa akan datang.

2. Sumber Daya Peralatan

Peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah semakin memadai dengan bertambahnya jumlah peralatan kebencanaan yang diperoleh dari BNPB dan dukungan APBD Tahun Anggaran 2022, namun BPBD Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat memerlukan Gudang untuk menyimpan peralatan yang ada. selain itu, semakin ekstrimnya kondisi iklim di Provinsi Sulawesi Selatan akhir-akhir ini membuat semakin dibutuhkannya peralatan yang memadai seperti kendaraan operasional, perahu polyethylene dan tenda darurat.

3. Sumber Daya Keuangan

Dengan Anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa sudah cukup untuk kegiatan rutin BPBD, tetapi apabila ada bencana terjadi dan memerlukan usaha rehabilitasi, dana masih dirasa kurang.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Governance. Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini juga berarti bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kali pengurangan anggaran (refocusing) sehingga secara otomatis mengakibatkan beberapa target kinerja sub kegiatan berkurang;
2. Terdapat kegiatan yang tidak terbayarkan sehingga menjadi hutang seperti belanja mobil tangki 2 (dua) unit dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga penganggarnya dialihkan di tahun anggaran selanjutnya.

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk mengatasi hambatan dan kenadala tersebut pada poin 4.1. di atas dilakukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan TAPD agar pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya lebih dioptimalkan dari sisi pencapaian target;
2. Berkoordinasi dengan TAPD terkait utang yang akan diparsialkan pada tahun anggaran selanjutnya.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dipenuhi. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Makassar, Februari 2024

KEPALA PELAKSANA,



Dr. AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19701113 199203 1 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN Berisi :

- 1. Perjanjian Kinerja 2023*
- 2. Indikator Kinerja Utama*

